

Manajemen dan Kebijakan Madrasah melalui Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan

Afroh Nailil Hikmah¹⁾, Agus Yudiawan²⁾

Jurusan Tarbiyah, STAIN Sorong

E-mail: afnay@gmail.com

Jurusan Tarbiyah, STAIN Sorong

E-mail: agusyudiawan@stainsorong.com

Abstract

Strengthening governance, accountability, and public image is a work of the national education plan. This policy aims to improve the capacity and competency management and budgeting of education in the implementation and management realize transparent and accountable education so as to create the image and services of the school / madrasah quality sound and accountable manner. These objectives can be achieved through, autonomy and decentralization of education, school-based management / madrasah, community-based management, and image enhancement.

Keywords: Governance, Accountability, Public image

Diterima 1 April 2019

Revisi 13 Mei 2019

Disetujui 18 Juni 2019

1. PENDAHULUAN

Harapan untuk tercapainya sekolah/madrasah yang ideal dengan terciptanya proses perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih partisipatif, terkordinasi, dan lebih menyeluruh terhadap jalur, jenis, dan kelembagaan satuan pendidikan. Meningkatkan pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik suatu program pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis kelembagaan pendidikan. Mereformasi kebijakan yang mengatur batasan-batasan kewenangan penyelenggaraan, baik yang menyangkut pengawasan internal maupun eksternal, atau yang menyangkut pengawasan mutu pendidikan, maupun pengawasan mutu administratif, terhadap satuan program penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan bidang yang diawasinya sehingga tercipta profesionalitas dan transparansi pengawasan dalam pembangunan pendidikan, (Yoyon Bahtian Irianto, 2011).

Penyelenggara wajib melaksanakan penyelenggaraan sekolah secara terbuka dan bertanggung jawab akan mutunya pada semua pihak terkait: siswa, orang tua, pemerintah, masyarakat, dan pasar atau penggunaan jasa lainnya. Mereka perlu mengetahui tempat belajar mereka: bagaimana mutunya, bagaimana pengelolaannya dananya, sarana, pengelolaan pengajar-belajar, dan kerjasamanya dengan berbagai pihak. Mereka, yaitu semua pihak terkait baik “orang dalam” maupun “orang luar” perlu mengetahui visi, misi, orientasi, tujuan, dan system yang digunakan agar mereka dapat membantunya dan menetapkan sikap atau tindakan yang diperlukan, (Mastuuhu, 2004).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode kajian pustaka. Teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti yakni mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka baik dari buku, jurnal, hasil seminar dan diskusi dengan para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dengan teknik interpretasi data dan peneliti memberikan penjelasan secukupnya ditinjau dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomisasi dan Desentralisasi

Prinsip otonomisasi dan desentralisasi ditegaskan pada GBHN 1999-2004 tentang pendidikan yang mencakup tujuh hal. Pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; kedua, peningkatan kemampuan akademik, profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan; ketiga, pembahasan sistem pendidikan sebagai pusat nilai sikap, kemampuan dan partisipasi masyarakat; kelima, pembahasan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi, dan manajemen; keenam, peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat; dan ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh, (Azyumardi Azra, 2002).

a. Otonomi Sekolah/Madrasah

Otonomi Manajemen Sekolah, secara konseptual digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan mutu pembelajaran, serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan ditopang. Model ini mencakup perencanaan penyelenggaraan pendidikan, dimana kewenangan dan tanggung jawab atas berfungsinya sekolah itu sangat bergantung pada kapasitas internalnya, dengan tidak bermaksud menghilangkan tanggungjawab kantor kementerian atau institusi yang membawahkan sekolah. Tujuannya adalah bagaimana institusi sekolah mampu menjadi wadah pembagunan manusia seutuhnya, (Danim, 2010).

Praktik otonomi manajemen sekolah pada agenda berbeda dengan era sebelumnya. Kepala sekolah dan koleganya akan menjadikan sekolah sebagai unit pembuatan keputusan, pembuatan semangat kolegal, penciptaan lingkungan yang partisipatoris antara staf dan siswa, pemanfaatan waktu yang fleksibel, personalisasi lingkungan sekolah yang meningkat dengan atmosfer kepercayaan bersama. Juga, implementasi kurikulum yang terfokus pada pemahaman siswa tentang apa yang mereka pelajari, mengetahui mengapa dan bagaimana, serta penekanan pada kemampuan tertib berpikir yang lebih tinggi bagi semua siswa, (Danim, 2010).

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam hal ini, manajemen berbasis sekolah tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, (Mulyasa, 2002).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang memilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas public, (Sa'ud, 2013).

b. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Pada mulanya istilah

ini digunakan pada keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional, (A. H. & I. Machali, 2012).

Desentralisasi pembangunan pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pembangunan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah, pemerintah daerah atau masyarakat. Sehingga diharapkan terjadi pemberdayaan peran unit di bawah atau peran rakyat dan masyarakat daerah. Akan tetapi, walaupun begitu luasnya otonomi dalam pembangunan pendidikan diberikan kepada daerah, tetap harus konsisten dengan sistem konstitusi, (Yoyon Bahtian Irianto, 2011).

Dengan desentralisasi pengelolaan sekolah diakui dan diberikan kepercayaan untuk menunjukkan eksistensi dan melakukan transformasi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pemahaman atas transformasi sekolah merupakan bagian integral dari ranah berpikir masyarakat, kepuasan pengguna, penerapan metode pembelajaran terbaik, implementasi kurikulum yang cerdas, kehadiran guru yang profesional, sistem evaluasi, aplikasi teknologi yang mendukung manajemen dan pembelajaran, dan sebagainya merupakan faktor dominan dalam kerangka transformasi sekolah menuju institusi pembelajaran yang ideal, (Danim, 2010).

Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan tuntutan dari diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi bidang pendidikan ini secara mikro lebih dikenal dengan otonomi sekolah atau desentralisasi pengelolaan sekolah yang berarti pengelolaan pendidikan berdasarkan kebutuhan sekolah / masyarakat. Sekolah diberikan kewenangan yang penuh dalam merancang kebutuhan layanan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan efisiensi dengan diperoleh dari kelulusan yang diberikan untuk mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Kemudian, meningkatkan mutu yang diperoleh melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah. Serta, meningkatkan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih bisa berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah, (A. H. dan I. Machali, 2012).

Pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka, efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal ini sekolah tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. MBS menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisienkan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan partisipasi masyarakat dan hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen berbasis sekolah. Melalui dewan sekolah, orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai pembuat keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami, serta mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan, (Mulyasa, 2002).

Kinerja kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen sekolah adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dengan mengimplementasikan MBS disekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam MBS dapat dilihat berdasarkan kriteria; pertama, mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik; kedua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat hingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan

sekolah dan pendidikan; keempat, berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain disekolah; kelima, bekerja dengan tim manajemen; keenam, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (Mulyasa, 2002).

Ada tiga karakteristik yang menjadi ciri khas dan harus dikedepankan dari yang lain pada manajemen tersebut, yaitu sebagai berikut: (1) Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan mutu yang sidosentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. (2) Dodomain manajemen peningkatan mutu pendiidkan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mecakup kurikulum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, penerimaan dan siswa baru. (3) Walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, diperlukan regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, (Mulyasa, 2002).

Menurut Wolter Wohlstetter dan Mohrman, terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari manajemen berbasis sekolah, yaitu powerlawthority, knowladge, information, dan reward. Keempatnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan menuntut kehadirannya, antara lain sebagai berikut: (1) kekuasaan / kewenangan (powerlawthority) harus didesentralisasikan di sekolah-sekolah secara langsung, yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya terhadap tiga bidang penting, yaitu budget, personnel, dan curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, guru dan staf sekolah. (2) pengetahuan (knoladge) juga harus didesntralisasikan sehingga sumberdaya manusia disekolah mampu meberikan

Manajemen Berbasis Masyarakat

Menurut Winarno Surakhamdan dan dikutip oleh Zubaidi konsep Pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat atartinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat atinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek atau pelaku pendidikan, bukan obyek pendidikan, pada konteks ini masyarakat dituntut berperan aktif dalam setiap program pendidikan. Pendidikan untuk masyarakat, diartikan masyarakat diikutsertaan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka. Dengan kata lain, masyarakat harus diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menialai apa saja yang diperlukan secara spesifik didalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri, (A. H. & I. Machali, 2012).

Manajemen pendidikan berbasis masyarakat minimal memiliki dua fungsi, yakni; pertama, fungsi utama sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat. Kedua, fungsi pendukung diantara sebagai pusat informasi bagi masyarakat sekitar, bagi lembaga pemerintahan dan lembabaga swadaya masyarakat, pusat jaringan informasi dan kerjasama, tempat koordinasi, konsultasi, komunikasi dan bermusyawarah, serta sebagai tempat kegiatan penyebarluasan program dan teknologi tepat guna, (Yoyon Bahtian Irianto, 2011). Hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pendidikan berbasis masyarakat menurut Waston yang dikutip Umberto Suhombing adalah, (Yoyon Bahtian Irianto, 2011):

Pertama, mementingkan warga belajar. Disini mempunyai beberapa penekanan seperti mendengar suara warga belajar, menggunakan apa yang dikatakan warga belajar sebagai dasar untuk mengembangkan program belajar, percaya bahwa setiap orang mempunyai kemampuan belajar karena setiap warga belajar memiliki kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, serta ada kesetaraan diantara warga dan pembina program. Kemudian, mendorong warga belajar untuk aktif terlibat dalam kegiatan belajar masyarakat, karena mereka mengetahui

apa yang mereka butuhkan. *Kedua*, program harus dimulai dari praktik kritis, menggunakan pendekatan kritis yang menekankan pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang sudah ada, dan partisipasi dalam setiap kegiatan. *Ketiga*, pembangunan masyarakat yang menekankan bahwa program belajar harus berlokasi dan menyatu dengan masyarakat, menjawab kebutuhan belajar masyarakat, menciptakan rasa memiliki, dan program tersebut dirancang, diputuskan, serta diatur oleh masyarakat sehingga mereka membentuk kesatuan yang lebih besar.

Citra Publik Sekolah/Madrasah

Dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan, maka suatu lembaga pendidikan dalam hal ini Madrasah Ibtidaiyah/madrasah perlu melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan menunjukkan citra positif. Menurut Alma Citra adalah impresi perasaan atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, mengenai suatu obyek, orang atau mengenai lembaga. Citra tidak dapat dicetak seperti mencetak barang, akan tetapi citra adalah kesan yang diperoleh sesuai dengan pengetahuan, pemahaman seseorang sesuatu, (A. H. dan I. Machali, 2012). Oleh karena itu, untuk mendapatkan perhatian masyarakat maka sekolah haruslah menciptakan citra publik yang mengesankan.

Citra terbentuk dari bagaimana lembaga melaksanakan kegiatan operasionalnya yang mempunyai landasan utama pada segi layanan. Citra juga terbentuk berdasarkan impresi, berdasarkan pengalaman yang dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga membangun suatu sikap mental. Sikap mental inilah yang nantinya digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian publik dalam rangka pembentukan image terhadap lembaga pendidikan, baik melalui daya tarik fisik maupun daya tarik yang bersifat akademis, religius. Dengan demikian maka sekolah/madrasah harus berusaha menciptakan image positif dihati masyarakat sehingga masyarakat dapat membuat keputusan untuk mendaftarkan putra putri mereka masuk ke lembaga pendidikan tersebut, (A. H. & I. Machali, 2012).

Dalam meningkatkan citra publik pendidikan, maka sekolah/madrasah perlu memberikan analisis dan memberikan pendekatan-pendekatan terhadap kebutuhan-kebutuhannya, yakni:

Pertama, analisis kebutuhan sosial. Bila pendekatan ini digunakan, maka tugas para perencana pendidikan harus memikirkan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan menganalisa; pertumbuhan penduduk, partisipasi dalam pendidikan, arus peserta didik dari kelas satu ke kelas yang lebih tinggi dan dari satu tingkatan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pilihan atau keinginan masyarakat dari individu tentang jenis-jenis pendidikan. Dengan demikian setiap warganegara terutama orang tua berijazah karena kemampuan dan prestasinya berhak mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, karena pendidikan dipandang merupakan faktor pendukung kearah kemajuan dalam bidang-bidang lain. Pilihan pribadi dan anggota masyarakat yang menentukan apakah dia harus mengikuti pendidikan atau bidang dari jenis pendidikan yang dikehendaki atau tidak. Dan pemerintah bertugas untuk menyiapkan sekolah-sekolah dan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk semua anak yang bersekolah. Dengan menganalisis sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka akan menciptakan kepercayaan terhadap sekolah/madrasah dari masyarakat untuk kesesuaian kebutuhan yang diinginkan masyarakat, (Sa'ud, 2013).

Kedua, pendekatan kebutuhan tenaga kerja. Pada tahap permulaan pembangunan dimana diperlukan banyak tenaga dari segala tingkatan dan berbagai jenis keahlian, untuk itu dicoba membuat perkiraan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh setiap pembangunan nasional perencanaan pendidikan dalam hal ini diharapkan dapat memberikan keyakinan penyediaan fasilitas dan pengaruh arus murid benar-benar didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja, (Sa'ud, 2013). Maka, sekolah harus mampu memberikan pendidik yang berkualitas sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, hal ini dapat memberikan pertimbangan lain dari masyarakat.

Ketiga, Pelayanan sekolah. Keyakinan merupakan pengetahuan dan kompetensi guru dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Keyakinan yang timbul merupakan suatu reputasi sekolah yang dibangun dalam kurun waktu tertentu dan yang utama merupakan cerminan dari kualitas guru. Untuk itu diperlukan strategi pendekatan permasalahan

internal yaitu bagaimana pemilik sekolah dapat memberikan peningkatan kemampuan /kompetensi guru serta memotivasi guru agar dapat semakin yakin akan organisasinya, (A. H. & I. Machali, 2012).

Keempat, daya tarik fisik. Daya tarik fisik merupakan salah satu bentuk menciptakan citra positif sekolah/madrasah, salah satunya dapat dilakukan sebagai berikut; membenahi gedung sekolah/madrasah yang menghadap kejalan secara artistik dan dengan desain yang baik, sehingga menarik perhatian masyarakat. Memasang lampu kuning kedap-kedip (perhatian hati-hati/pelan-pelan) bagi pengemudi. Kerjasama dengan media, kepala sekolah/madrasah gencar mengadakan pidato-pidato, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan menginformasikan lembaganya dengan baik. memberikan konsultasi dan nasehat sebagai layanan masyarakat mengadakan peringatan hari besar keagamaan yang melibatkan masyarakat, (A. H. & I. Machali, 2012).

4. PENUTUP

Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik Madrasah adalah dengan meningkatkan mutu laporan dan pertanggungjawaban para pengelola pendidikan yang lebih transparan dan dapat dipercaya terhadap pelaksanaan pendidikan. Meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya dalam upaya mendukung sistem pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut manajemen pembangunan di daerah. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholder pendidikan lainnya yang diarahkan pada kebersamaan memikul tanggung jawab antar pemerintah, masyarakat, dan peserta didik sebagai bagian dari subyek pembelajaran, yang dinamis, adaptif, dan penuh inisiatif. Merintis pembangunan, dan mengembangkan inovasi-inovasi pendidikan yang lebih bersifat antisipatif kearah peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan. Dalam rangka menciptakan sekolah yang memiliki tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik Madrasah yang ideal dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni; (1) Otonomisasi dan Desentralisasi, (2) Manajemen Berbasis Sekolah (3) Manajemen Berbasis Masyarakat. Selanjutnya, citra publik juga berperan penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan citra publik untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat adalah sebagai berikut: *Pertama*, analisis kebutuhan sosial, menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan sosial yang ada dalam masyarakat. *Kedua*, pendekatan kebutuhan tenaga kerja. *Ketiga*, pelayanan sekolah. *Keempat*, daya tarik fisik, membenahi gedung sekolah/madrasah yang menghadap kejalan secara artistik dan dengan desain yang baik, sehingga menarik perhatian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan demokratisasi*. Kompas.
- Danim, S. (2010). *Otonomi Manajemen Sekolah*. Alfabeta.
- Machali, A. H. & I. (2012). *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Kaukaba.
- Machali, A. H. dan I. (2012). *Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Kaukaba.
- Mastuuhu. (2004). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21*. Safiria Insani Press.
- Mulyasa. (2002). *Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Sa'ud, U. S. (2013). *Pengembangan Profesi Guru*. Alfabeta.
- Yoyon Bahtian Irianto. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*,. Rajagrafindo Persada.